

**PERAN KELEMBAGAAN PETANI DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
PADI SAWAH DI DESA GENTUNGANG KECAMATAN BAJENG BARAT
KABUPATEN GOWA**



**MUH. AGIL GIFFARI ALHAM
G021191083**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



**PERAN KELEMBAGAAN PETANI DALAM PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS PADI SAWAH DI DESA GENTUNGANG
KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA**

**MUH. AGIL GIFFARI ALHAM
G021191083**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



**PERAN KELEMBAGAAN PETANI DALAM PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS PADI SAWAH DI DESA GENTUNGANG
KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA**

MUH. AGIL GIFFARI ALHAM
G021191083

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Agribisnis

pada

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



SKRIPSI**PERAN KELEMBAGAAN PETANI DALAM PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS PADI SAWAH DI DESA GENTUNGANG KECAMATAN
BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA****MUH. AGIL GIFFARI ALHAM
G021191083**

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Program Studi
Agribisnis pada tanggal 08 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat kelulusan
pada

Program Studi Agribisnis
Departemen Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin
Makassar

Disetujui Oleh:

Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S
19610829 198601 2 001

Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si
19660427 199103 2 002

Diketahui Oleh:



Prof. Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si
19721107 199702 2 001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Peran Kelembagaan Petani Dalam Pengembangan Agribisnis Padi Sawah di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 08-03-2024 -



Muh. Agil Giffari Alham

G021191083



RIWAYAT HIDUP



Muh. Agil Giffari Alham lahir di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19 Januari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Terlahir dari pasangan Bapak **Alham R. Syahrana** dan Ibu **Retno Purwastutioningsih**. Penulis memulai Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Aisyiah Busthanul Athfal Kota Makassar pada tahun 2006-2007, Kemudian dilanjutkan di Sekolah Dasar SD Negeri Kompleks Ikip 1 Makassar pada tahun 2007-2013. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 3 Makassar pada tahun 2013-2016. Selanjutnya melanjutkan Pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 5 Makassar tahun 2016-2019. Kemudian penulis melanjutkan studi S1 nya di Perguruan Tinggi tepatnya di Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Angkatan 2019 melalui JNS (Jalur Non Subsidi). Selama menempuh Pendidikan di Universitas Hasanuddin selain mengikuti kegiatan akademik dengan sebaik-baiknya, penulis menghimpun diri dalam kegiatan yang membentuk karakter dan adab oleh Himpunan Mahasiswa Peminat Sosial Ekonomi Pertanian (MISEKTA). Penulis turut aktif pula dalam kepanitiaan pada tingkat Departemen dan Fakultas serta seminar-seminar mulai dari lingkup Universitas hingga pada lingkup Internasional.



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Besar. Segala Puji yang tak teruji dan Syukur yang tak terukur bagi-Nya yang akan selalu Besar dengan Kebesaran-Nya dan yang akan selalu Benar dengan Kebenaran-Nya.

Shalawat serta Salam yang akan terus disenandungkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, kekasih Allah SWT yakni Nabiullah Muhammad SAW yang akan selalu dirindukan dan kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak.

Melalui kesempatan yang mulia ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu semasa penulis mengemban pendidikan di kampus khususnya pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih setulus hati kepada keluarga penulis terutama pada **Ayahanda Alham R. Syahrana** dan **Ibunda Retno Purwastutioningsih** atas setiap doa tulus yang tidak pernah putus untuk penulis, ridho, semangat, dorongan dan kasih sayang yang senantiasa tercurah kepada penulis. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit kendala yang penulis hadapi dalam proses penelitian hingga penyelesaian akhir skripsi ini. Oleh karena itu penulis haturkan terima kasih yang terhingga kepada berbagai pihak yang turut memiliki andil dalam penysunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S.** dan Ibu **Dr. Ir. Rahmadanih, M. Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya yang amat berharga untuk memberikan pengarahan dan petunjuk serta bimbingannya sejak dari awal penyusunan rencana penelitian sampai selesainya penulisan skripsi ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terkadang membuat Ibu dan Bapak kecewa, baik saat perkuliahan maupun selama proses bimbingan dan penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan Ibu dan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Eymal B. Demmallino, M.Si.** dan Ibu **Rasyidah Bakri, S.P., M. Sc.**, selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya yang sangat berarti dalam memberikan kritikan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Penulis maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan serta tingkah



laku yang kurang berkenan selama ini, baik saat perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa berada dalam lingkungan Allah SWT.

3. Ibu **Prof. Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si.**, dan Bapak **Ir. Rusli M. Rukka, S.P., M.Si.**, selaku Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen Sosial Ekonomi Pertanian yang telah banyak memberikan pengetahuan, mengayomi, dan memberikan teladan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga kebaikan Ibu dan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan senantiasa berada dalam lingkungan Allah SWT.
4. **ADHIGANA** khususnya kepada saudara-saudari seperjuangan di **Rindang House** dan **No System** yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang bersifat konstruktif demi perbaikan skripsi ini. Semoga kita semua dapat meraih apa yang diimpikan.
5. Bapak dan Ibu dosen khususnya di Departemen Sosial Ekonomi Pertanian karenanyalah penulis bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan fokus pelajaran di Departemen Sosial Ekonomi Pertanian akan tetapi penulis mendapatkan pelajaran kehidupan dan teladan dari apa yang bapak dan ibu bagikan kepada kami.
6. Seluruh staf dan pegawai departemen sosial ekonomi pertanian dan pegawai administrasi fakultas pertanian yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi.

Semoga segala perhatian, bantuan, dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan menjadi tabungan amal ibadah untuk hari akhir nanti. Akhir kata, dengan segala kekurangannya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai sebuah hasil karya dan penambah referensi pengetahuan bagi pembacanya, *Aamiin*.

Makassar, 08 Maret 2024

Penulis



ABSTRAK

PERAN KELEMBAGAAN PETANI DALAM PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI DESA GENTUNGANG KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA

Pentingnya kelembagaan petani diakui dalam pembangunan pertanian, baik di negara industri maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun kenyataan memperlihatkan kecenderungan masih lemahnya kelembagaan petani dinegara berkembang, serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani. Kelembagaan petani diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi petani, disamping itu juga permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah satunya kelembagaan petani. Daerah yang menjadi sasaran penelitian yang terpilih adalah di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa dengan dasar pertimbangan pemilihan daerah tersebut adalah merupakan salah satu daerah penyangga beras di Sulawesi Selatan dengan tingkat produksi padi sebesar 240.544 ton, akses komunikasi dan informasi mudah diperoleh serta berdasarkan pertimbangan wilayah yang dekat dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2023. Lembaga yang berperan penting dalam pengembangan Agribisnis Padi Sawah di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa adalah Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa, Balai Penyuluhan Pertanian UPT Limbung, Penyuluh Pertanian lapangan WKPP Gentungang, Pemerintah Desa Gentungang, Kelompok tani Desa Gentungang, Gapoktan Desa Gentungang, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Desa Gentungang, Kios Pupuk Pertanian, KUD Mandalle dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sungguminasa Peran pemerintah dalam pengembangan agribisnis padi adalah dengan memberikan fasilitas berupa bantuan benih padi, bantuan saprodi, bantuan alat mesin pertanian seperti kompanisasi, mesin traktor (*combine*), handsprayer, cultivator dan bimbingan teknis serta penyuluhan.

Kata kunci: Kelembagaan petani, Padi, Kelompok tani, Pengembangan



ABSTRACT

THE ROLE OF FARMERS INSTITUTIONS IN AGRIBUSINESS DEVELOPMENT RICE FIELDS IN GENTUNGANG VILLAGE, WEST BAJENG DISTRICT GOWA DISTRICT

The importance of farmer institutions is recognized in agricultural development, both in industrial countries and developing countries such as Indonesia. However, the reality shows that there is still a tendency for farmers' institutions to be weak in developing countries, as well as the large obstacles in growing institutions in farming communities. Farmer institutions are expected to be able to help farmers get out of the problem of farmers' economic inequality. Apart from that, the problem in managing agricultural resources is the problem of unsupportive agricultural institutions, one of which is farmer institutions. The selected research target area was Gentungang Village, West Bajeng District, Gowa Regency, based on considerations for selecting this area, it is one of the rice buffer areas in South Sulawesi with a rice production level of 240,544 tonnes, access to communication and information is easy to obtain and based on regional considerations. which is close to the capital of South Sulawesi Province. The time this research was carried out was from August to December 2023. The institutions that play an important role in the development of Rice Agribusiness in Gentungang Village, West Bajeng District, Gowa Regency are the Gowa Regency Food Crops and Horticulture Service, the UPT Limbung Agricultural Extension Center, the WKPP Gentungang field agricultural instructor, Gentungang Village Government, Gentungang Village Farmers Group, Gentungang Village Gapoktan, Gentungang Village Main Fisheries Farmers Contact (KTNA), Agricultural Fertilizer Kiosk, KUD Mandalle and Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sungguminasa The government's role in developing rice agribusiness is to provide facilities in the form of seed assistance rice, agricultural input assistance, agricultural machinery assistance such as companizers, tractor machines (combines), handsprayers, cultivators and technical guidance and counseling

Keywords: *Farmer institutions, Rice, Farmer groups, Agribusiness developmen*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
RIWAYAT HIDUP	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Research Gap (Novelty).....	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	5
1.6 Kerangka Pemikiran	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Agribisnis Padi Sawah	8
2.2 Kelembagaan	9
2.3 Konsep Peran kelembagaan	12
2.4. Kelembagaan Petani	14
III. METODE PENELITIAN.....	16



3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	16
3.3 Penentuan Informan	16
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	17
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.6 Metode Analisis Data	18
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	20
4.1.1 Kondisi Geografi dan Administratif	20
4.1.2 Kondisi Topografi	21
4.1.3 Kondisi Demografi	22
4.2 Kelembagaan	26
4.2.1 Pemerintah Desa.....	26
4.2.2 Kelompok Tani	28
4.2.3 Lembaga Swasta.....	29
4.3 Peran Lembaga	30
4.3.1 Pemerintah	30
4.3.2 Kelompok Petani.....	41
4.3.3 Lembaga Swasta.....	46
4.4 Penguatan Lembaga.....	51
4.4.1 Pemerintah	51
4.4.2 Kelompok Petani.....	54
4.4.3 Lembaga Swasta.....	56
V. KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LA	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Bajeng Barat, 2023.....	24
Tabel 2	Latar belakang informan menurut Jenis Kelamin, Usia dan Tingkat Pendidikan di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat, 2023.....	25
Tabel 3	Latar belakang informan menurut pekerjaan dan jumlah tanggungan di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat, 2023	26
Tabel 4	Latar belakang informan menurut pengalaman usahatani, Luas Kepemilikan Lahan, dan Tingkat Pendapatan kotor di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat, 2023.....	27
Tabel 5	Jumlah kelompok tani di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat, 2023.....	29
Tabel 6	Lembaga swasta yang berperan membantu petani di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat, 2023.....	30
Tabel 7	Daftar Penerima Bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian di Kelompok tani Kecamatan Bajeng Barat tahun 2023.....	36
Tabel 8	Rencana kerja penyuluh pertanian di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng barat tahun 2024.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.	7
------------------------------------	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Nama Kelompok tani, jumlah dan jenis bantuan benih yang diperoleh kelompok tani di Kabupaten Gowa yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023.....	68
Lampiran 2.	Jumlah dan jenis bantuan benih yang diperoleh kelompok tani yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 di Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.....	76
Lampiran 3.	Jumlah dan jenis bantuan benih yang diperoleh kelompok tani di Kabupaten Gowa bersumber dari APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.....	84
Lampiran 4.	Daftar Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Gowa, 2023	88
Lampiran 5.	Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	94



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kenyataan yang harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Kenyataan inilah sehingga sektor pertanian dianggap merupakan salah satu lembaga yang berperan penting bagi setiap negara begitu pun juga dengan negara Indonesia. Indonesia dikatakan sebagai negara agraris, dimana sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian pada bidang pertanian. Selain itu sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting dalam struktur perekonomian negara. Peran pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional terbukti tidak hanya pada situasi normal, tetapi terlebih pada krisis. (Sunarti, 2016). Begitu pentingnya sektor pertanian di Indonesia disebabkan karena potensi sumberdayanya yang besar dan beragam, memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional cukup besar, jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini besar, dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan (Pratama, 2011). Demikian juga dikemukakan oleh Syahza, (2013) bahwa pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor selain itu berdampak pula pada peningkatan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk itu pembangunan pertanian akan terus didorong terutama di daerah karena dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Berdasarkan kecenderungan pembangunan pertanian di Indonesia saat ini yang berbasis pada sistem agribisnis, maka peran kelembagaan pertanian, termasuk kelembagaan petani, sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian (Sapta Anantayyu, 2011).

Kelembagaan merupakan keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar (Sapta Anantayyu, 2011) sedangkan menurut Syahyuti (2014) bahwa lembaga adalah berisi norma, nilai, regulasi, pengetahuan dan lainnya, yang menjadi pedoman dalam berperilaku aktor (individu atau organisasi). Oleh karena itu kelembagaan yang dimaksud di atas adalah kelembagaan petani dimana lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas (*local institution*), yang berupa organisasi keanggotaan (*organization*) atau kerjasama (*cooperatives*) yaitu petani bergabung dalam kelompok kerjasama (Uphoff, 1986; Sapta). Oleh karenanya kelembagaan pertanian merupakan organisasi yang terstruktur dan terpoli serta dipraktekkan untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang jani penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Jika



dikaitkan dengan sistem agribisnis, kelembagaan termasuk subsistem jaspembanungan dimana lembaga tersebut harus mampu berperan dalam menunjang terhadap kegiatan dalam subsistem pengadaan sarana produksi, usahatani, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran. Petani sebagai pelaku utama adalah subjek dalam pembangunan agribisnis tersebut yang merupakan konsumen dari jasa yang diberikan oleh lembaga penunjang agribisnis tersebut. Dimana sistem agribisnis akan berjalan dengan baik jika tidak terjadi kesenjangan antara lembaga penunjang dengan kegiatan usahanya.

Pentingnya kelembagaan petani diakui dalam pembangunan pertanian, baik di negara industri maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun kenyataan memperlihatkan kecenderungan masih lemahnya kelembagaan petani dinegara berkembang, serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat petani. Kelembagaan petani diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi petani, disamping itu juga permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah satunya kelembagaan petani. Untuk itu perlu adanya pembangunan kelembagaan petani yang dilandasi pemikiran bahwa: (a) Proses pertanian memerlukan sumberdaya manusia tangguh yang didukung infrastruktur, peralatan, kredit, dan sebagainya; (b) Pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumberdaya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit-unit produksi; (c) Kegiatan pertanian mencakup tiga rangkaian: penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi berharga; (d) Kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat hingga lokal; dan (e) Kompleksitas pertanian, yang meliputi unit-unit usaha dan kelembagaan, sulit mencapai kondisi optimal (Teguh Soedarto dan Nurl Huda, 2022; Sapta Anantayu, 2011).

Belum berfungsi secara optimal kelembagaan petani menurut Dimiyati (2007), Peraturan Presiden RI, (2020), dan Kementerian Pertanian RI, (2021) bahwa permasalahan yang masih melekat pada sosok petani terkait kelembagaan petani adalah (1) Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran; (2) Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Artinya aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (*on farm*); (3) Masih kurangnya akses fasilitas bantuan akses permodalan, dan posisi tawar petani; (4) masih lemahnya peran dan jaan petani sebagai wadah organisasi petani. Begitu nbagaan petani makadiperlukan penguatan kelembagaan sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik i, maupun individual didalam memperbaiki kinerja ra keseluruhan. Istilah penguatan kelembagaan, tidak jian manajemen, yang memiliki makna mengatur atau



mengelola. Jika dua kata tersebut digabungkan, maka memiliki arti mengelola atau mengatur manusia, *manage to man* (Karyoto, 2015).

Untuk itu perlu dilakukan pengembangan kapasitas (*capacity building*) atau serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja (Morrison, 2001). Manakala Suprpto et al., (2021) secara khusus mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pengembangan kapasitas. Ini terdiri dari lima poin: keterlibatan, kepemimpinan, komunikasi, sumber daya dan budaya. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penguatan kelembagaan adalah proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta sikap dan perilaku. Pentingnya kelembagaan petani sebagai tempat untuk belajar, unit produksi dan wadah kerjasama sangat diperlukan. Untuk itu peningkatan penguatan kapasitas kelembagaan petani dapat dilakukan sejalan dengan kegiatan bagaimana memberikan peran yang proporsional agar petani dapat berperan secara aktif dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Untuk upaya tersebut diperlukan proses pendidikan untuk mengubah sikap petani, dan membangkitkan kegairahan dan hasrat serta kepercayaan akan kemampuan sendiri (*self help*) perorangan dan kelompok untuk memperbaiki nasib sendiri (Sapta Anantanyu, 2011).

Melihat permasalahan petani di atas sudah barang tentu keberadaan kelembagaan petani sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup, harkat dan martabat petani, sehingga peneliti mencoba mencari solusi dari penguatan kelembagaan pemerintah, petani dan swasta dalam upaya pengembangan agribisnis padi petani maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Peran Kelembagaan Petani Dalam Pengembangan Agribisnis Padi Sawah di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan usaha taninya petani tidak bisa lepas dari hubungan kerja dengan lembaga-lembaga pendukungnya, seperti kelompok tani, pedagang saprodi, pedagang hasil pertanian, penyuluh, koperasi, bank, dan pemerintah daerah. Hubungan kerja ini kadangkala menimbulkan banyak gap dan permasalahan terutama terkait kelembagaan dan tingkat pendapatan petani, sehingga di perlukan upaya yang sistematis dalam memecahkan permasalahan tersebut. Beberapa hal terkait hal ini maka dapat disimpulkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:



apa saja yang mempunyai peranan penting dalam agribisnis padi sawah di Desa Gentungang Bajeng Barat Kabupaten Gowa?

2. Bagaimana penguatan kelembagaan dalam upaya pengembangan agribisnis padi sawah di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa?

1.3 Research Gap (Novelty)

Beberapa hasil penelitian telah dilakukan terkait Peran Kelompok tani oleh Herni Lindiawati, et al (2023) dengan judul penelitian peran kelompok tani dalam peningkatan produktivitas padi di Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dimana penggunaan metode penelitian adalah studi kasus dengan metode pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (*Purposive*) dengan pertimbangan bahwa Desa Kedung Jaya memiliki produktivitas padi terbesar di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada Bulan Desember 2022. Analisis Data menggunakan *Chi-Square* (X^2) pada taraf signifikansi 0,05 dan ditambah dengan informasi kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelompok tani di Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi termasuk kedalam kategori tinggi. Tingkat produktivitas padi pada kelompok tani di Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi termasuk kedalam kategori tinggi yaitu $\geq 8,2$ Ton/Ha. Hasil uji *Chi-Square* diperoleh X^2 hitung sebesar 8,674 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara peran kelompok tani dengan peningkatan produktivitas padi di Desa Kedungjaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Wuri Azwita Handayani, et al (2022), dengan judul penelitian peran kelompok tani dalam peningkatan produktivitas usahatani padi. Metode penelitian yang digunakan adalah survey terhadap petani anggota Kelompok Tani di Desa Bayuning Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan dengan teknik pengambilan sampel *proportionate random sampling*. Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara peran kelompok dan produktivitas digunakan Uji Korelasi Konkordansi Rank Kendal W dan Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelompok tani memiliki kategori sangat berperan. Produktivitas usahatani padi petani berada pada kategori sedang. Secara simultan terdapat hubungan signifikan antara peran kelompok tani dengan produktivitas usahatani dengan keeratan hubungan sangat kuat. Secara parsial terdapat hubungan antara peran kelompok tani sebagai wahana belajar, wahana kerja sama maupun unit produksi dengan produktivitas usahatani padi.

Penelitian lain juga terkait peran kelembagaan antara lain oleh Yoyon Haryanto, et al (2022) dengan judul penelitian Penguatan Kelembagaan pada Komunitas Petani Padi di Lokasi *Food Estate*. Hasil penelitian memperlihatkan bila variabel yang kuat dalam karakter kelembagaan adalah aspek sosial itabilitas, dengan pencari anggotanya adalah memiliki an yang cenderung rendah dan mempunyai pengalaman



berusaha tani yang cukup baik dengan aspek teknis yang baik, tetapi lemah dalam penguasaan manajerial. Penelitian yang lain tentang Model Kelembagaan pada Agribisnis Padi Organik Kabupaten Tasikmalaya telah dilakukan oleh Candra Nuraeni (2016), yang menggunakan metode deksriptif kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profil lembaga agribisnis padi organik meliputi kelompok tani, gabungan kelompok tani Simpati, koperasi petani organik, koperasi desa, perusahaan swasta agroindustri (CV), Balai Penyuluhan Pertanian, NGO, eksportir, perusahaan agroindustri. Penelitian juga telah dilakukan oleh Nia Wulanda Saragih (2021), yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif, hasil penelitian menunjukan bahwa peranan kelompok tani dalam peningkatan pendapatan termasuk dalam kategori baik dengan indeks skor 67,50%, artinya standar indikator peranan kelompok tani sudah dapat berperan baik dalam peningkatan pendapatan petani. Dilihat dari 3 indikator yaitu Peran kelompok tani sebagai kelas belajar memiliki rata-rata 75,71% dengan kategori kuat (berperan). Selanjutnya peran kelompok tani sebagai wahana kerjasama memiliki skor tertinggi yaitu 78,77% dengan kategori kuat (berperan) ada pula peran kelompok tani sebagai unit produksi dengan skor terendah 48,01% dengan cukup berperan. Fokus dalam penelitian yang akan dilakukan ini untuk menganalisis sejauh mana peranan Kelembagaan Petani Dalam Pengembangan Agribisnis Padi Sawah di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Kabupaten Gowa.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi lembaga apa saja yang mempunyai peranan penting dalam pengembangan agribisnis padi sawah di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.
2. Menganalisis penguatan kelembagaan dalam upaya pengembangan agribisnis padi sawah di Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian yang direncanakan maka kegunaan penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, dari segi informasi penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi perencanaan dan perumusan kebijakan bagi pembangunan, terutama untuk meningkatkan daya saing an agribisnis khususnya di Desa Gentungang Kecamatan upaten Kabupaten Gowa. Selain itu penelitian ini juga mampu menjadi bahan masukan dan sumbangan dalam menjawab persoalan-persoalan kelembagaan



agribisnis baik bagi petani maupun pada masyarakat pengguna lainnya;

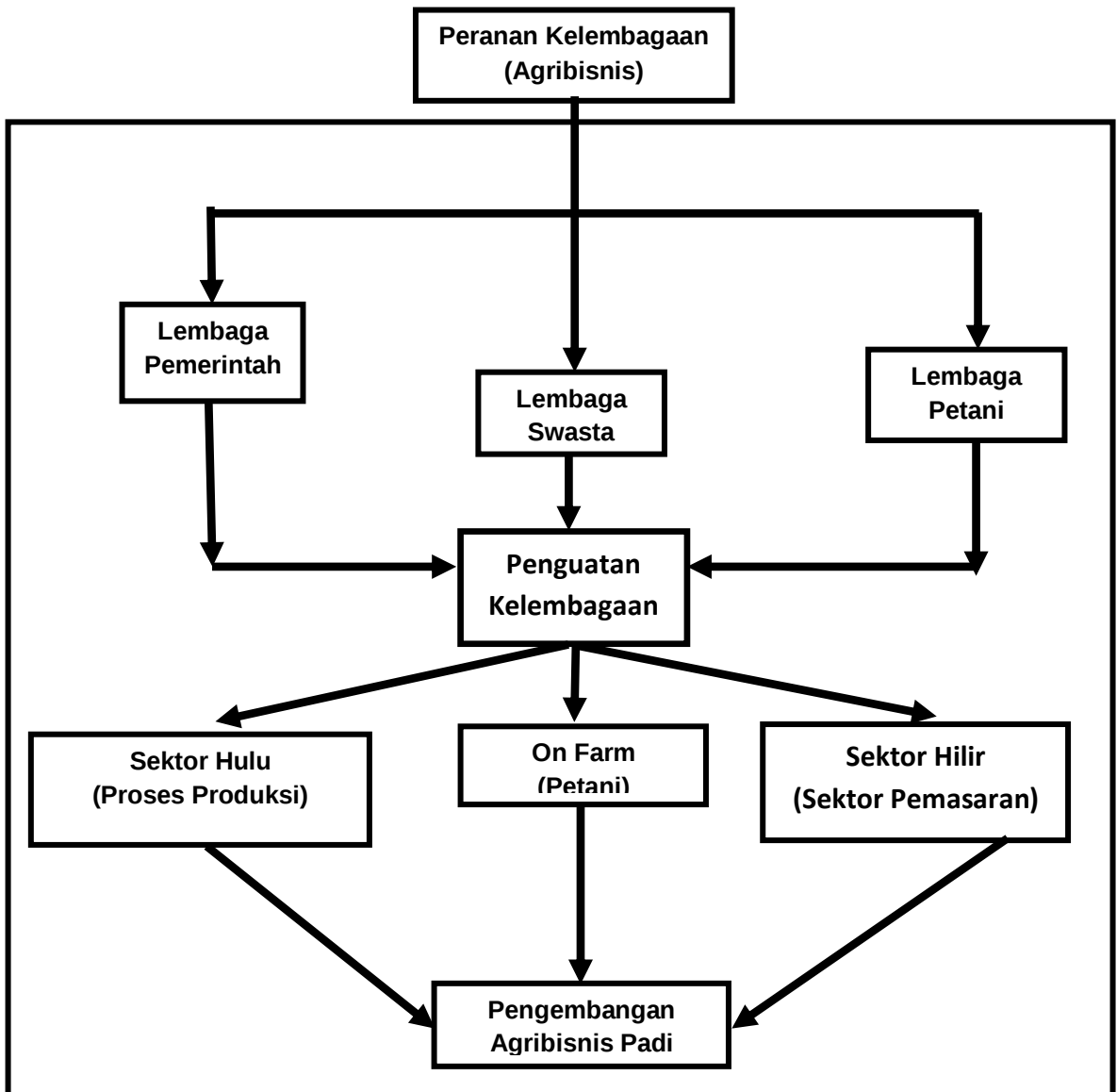
2. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi informasi penting kepada petani dan masyarakat secara keseluruhan guna meningkatkan pendapatan petani. Disamping itu diharapkan dapat mengetahui sejauh mana peranan kelembagaan dalam pengembangan agribisnis padi sawah;
3. Bagi akademik/peneliti, dari segi informasi penelitian dapat digunakan sebagai bahan rujukan/referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam peningkatan pengetahuan mengenai kelembagaan dalam pengembangan agribisnis padi sawah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pertanian yang maju, mandiri dan modern dapat terwujud jika para petani dan kelembagaan petani serta pemangku kepentingan lainnya punya kesiapan dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui cara meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing dari produk yang dihasilkan, selain itu juga diharapkan adanya penguatan korporasi petani, sehingga pendekatan ini akan mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan kesejahteraan petani.

Proses yang melibatkan kelembagaan, baik dalam bentuk lembaga organisasi lembaga pemerintah, swasta dan petani maupun kelembagaan norma serta tata pengaturan, pada umumnya masih terpusat pada proses pengumpulan dan pemasaran dalam skala tertentu. Bagi sebagian besar wilayah, eksistensi kelembagaan pertanian dan petani belum terlihat perannya. Padahal fungsi kelembagaan pertanian sangat beragam, antara lain sebagai penggerak, penghimpun, penyalur sarana produksi, pembangkit minat dan sikap, dan lain-lain. Oleh karena itu elemen kelembagaan sebagai salah satu yang penting dalam peningkatan keterampilan dan perbaikan kemampuan produksi petani sering terlupakan disebabkan karena peran nyata dalam proses produksi sering berada dalam posisi marginal. Untuk lebih mengetahui kejelasan kerangka pikir penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut.





Gambar 1. Kerangka Pemikiran



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agribisnis Padi Sawah

Menurut Saragih (2010), di dalam pendekatan agribisnis, usahatani tidak hanya berorientasi pada produksi yang tinggi, tetapi yang lebih utama adalah berorientasi komersil sehingga yang paling mendapat perhatian adalah efisiensi dari penggunaan faktor-faktor produksi. Lebih jauh dinyatakan bahwa sistem agribisnis mencakup empat sub sistem inti yaitu: (1) Industri hulu pertanian atau disebut juga agribisnis hulu yaitu industri-industri yang menghasilkan peralatan dan sarana produksi (*input*) pertanian seperti industri yang menghasilkan mesin dan alat-alat pertanian, industri agrokimia (pupuk, pestisida, industri obat-obatan), (2) usahatani atau perkebunan dimana terjadi proses produksi secara biologis dibawah kendali seorang petani atau seorang pengusaha bersama para pegawai perkebunan. Sub sistem ini disebut juga *on farm* agribisnis, (3) Industri-industri yang kegiatannya adalah mengolah hasil pertanian menjadi produk olahan baik produk antara maupun produk akhir. (4) Perusahaan-perusahaan pemasaran (*agricultural marketing*) yaitu lembaga-lembaga yang memasarkan produk-produk pertanian Primer baik ke pasar lokal maupun ke industri- industri atau ke pasar luar negeri (ekspor).

Downey dan Erickson (1992), agribisnis adalah keseluruhan dari kegiatan di bidang pertanian yang mencakup pengadaaninput usahatani, kegiatan produksi usahatani, kegiatan pengolahan hasil pertanian dan kegiatan pemasaran hasil pertanian. Selain dari itu terdapat sub sistem penunjang yaitu lembaga-lembaga yang mendukung lancarnya kegiatan pada keempat sub sistem agribisnis misalnya lembaga keuangan dan lembaga penelitian dan lembaga penyuluhan. Di dalam proses pembangunan pertanian, agribisnis merupakan cara pandang baru dalam melihat kegiatan pertanian sebagai suatu unit bisnis dimana ada input, ada proses produksi dan ada output. Jika ketiga aspek ini dikelola sedemikian rupa maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi bagi pengelolanya. Agribisnis juga tidak hanya memperhatikan sisi penawaran (*supply side*) yakni memasok hasil produksi sebanyak-banyaknya ke pasar tetapi juga harus memperhatikan sisi permintaan (*demand side*) yakni jenis, bentuk produk yang diinginkan oleh konsumen, serta harga yang berlaku di pasar. Dalam hal ini, pengembangan usahatani dari prespektif agribisnis memandang bahwa tidak hanya bercocok tanam atau berkebun saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga bagaimana menyediakan sarana produksinya, bagaimana proses produksi yang aimana mengolah dan memasarkan produk yang a bagaimana keterlibatan lembaga penunjang seperti < membantu membiayai usahatani yang dikelola. Selain erkuat posisi tawar petani, diperlukan suatu kelembagaan serta koperasi yang dapat memasok kebutuhan input sarkan hasil usahatani dari para petani anggotanya.



Selama ini para petani hanya melaksanakan salah satu sub sistem agribisnis yaitu sub sistem produksi pada tingkat usahatani (*on farm*), sehingga pendapatan yang diperoleh selalu rendah. Itu sebabnya dalam pendekatan agribisnis, para petani diajarkan untuk melakukan integrasi kegiatan usahatani mulai dari sub sistem pengadaan input dan sub sistem produksi sampai kepada sub sistem pengolahan dan pemasaran hasil. Akan tetapi salah satu kesulitan petani untuk melakukan agribisnis secara terintegrasi adalah karena kurangnya modal serta belum dikuasainya teknologi pengolahan hasil pertanian yang sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu skala usaha yang dikelola oleh para petani umumnya kecil sehingga tidak ekonomis untuk melakukan pengolahan secara sendiri-sendiri. Sehubungan dengan keterbatasan petani seperti itu maka salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengajak petani untuk membentuk kelompok tani dan koperasi para petani. Dengan demikian mereka dapat mendatangkan sarana produksi secara berkelompok dan juga mengolah atau memasarkan hasil produksinya secara bersama-sama. Hal ini selain memberikan keuntungan dalam bentuk penurunan biaya pengadaan input, juga mencegah para petani dari permainan harga oleh para pedagang hasil pertanian. (Soekartawi, 2002).

Faktor-faktor yang penting dan harus diputuskan dalam perencanaan agribisnis pada sub sistem produksi Primer adalah pemilihan komoditas, pemilihan lokasi produksi, skala usaha dan perencanaan proses produksi. Dalam pemilihan komoditas harus ditetapkan jenisnya (varietasnya) dan harus sesuai dengan kondisi alam lokasi yang direncanakan. Pada agribisnis skala besar, pemilihan lokasi mempunyai pengaruh yang besar bagi keberhasilan dan kesinambungan usaha tersebut. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi yaitu (1) Ketersediaan tenaga kerja, prasarana dan sarana-sarana fisik penunjang; (2) lokasi pemasaran; dan (3) ketersediaan insentif wilayah (Sa'id dan Intan, 2001).

2.2 Kelembagaan

Handayani (2013) menyebutkan bahwa kelembagaan mengandung dua pengertian, yaitu institusi dan nilai/norma adalah sebuah institusi yang di dalamnya terkandung nilai/norma. Nilai dan norma yang ada dalam institusi inilah yang mengatur jalannya institusi tersebut. Sementara, agribisnis merupakan bisnis dalam sektor pertanian baik dari hulu hingga hilir yang mencakup seluruh aktivitas yang meliputi produksi, penyimpanan, pemasaran, prosesing bahan dasar dari usaha tani, serta penyediaan pelayanan penyuluhan, penelitian, dan kelembagaan agribisnis adalah institusi yang terkait dengan bisnis pertanian yang di dalamnya terkandung nilai dan norma yang mengaturnya. Kelembagaan adalah bagian dari organ-organ dalam tubuh manusia yang hidup dalam



masyarakat. Kata “kelembagaan” menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (*established*) yang hidup (*constituted*) di dalam masyarakat. Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku yang hidup pada suatu kelompok orang. Ia merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial (Koentjaraningrat, 1997).

Keberadaan kelembagaan pertanian bagi petani merupakan keharusan guna memperbaiki taraf hidup, harkat dan martabat petani. Pentingnya kelembagaan pertanian kelompok tani sangat diperlukan sebagai wadah petani untuk kelas belajar, sebagai unit produksi, dan wadah kerjasama. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dapat dilakukan sejalan dengan kegiatan penyuluhan pertanian dengan memotivasi petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan (Indraningsih, dkk., 2021). Lembaga di pedesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sifatnya tidak linier, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, berupa: kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan hubungan sosial, pengakuan, dan pengembangan pengakuan. Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat (Elizabeth dan Darwis, 2003). Keberadaan kelembagaan lain yang berfungsi dalam penyediaan input produksi, penyediaan modal, pemasaran dan sebagainya. Hasil penelitian Tedjaningsih, dkk (2018) menunjukkan untuk kinerja kelembagaan agribisnis sangat penting ditunjukkan petani merasa puas dengan kios sarana produksi, pedagang pengumpul/bandar, kelompok tani, penyuluh dan perguruan tinggi yang cukup baik kinerjanya dalam menjalankan fungsi kelembagaan agribisnis.

Kelembagaan petani yang dimaksud disini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas yang berupa organisasi keanggotaan atau kerja sama yaitu petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama (Uphoff, 1986). Hal ini menimbulkan tantangan bagi para petani untuk mengidentifikasi dan mengukur



lembagaan tersebut dalam rangka membangun strategi agribisnis hortikultura sedangkan menurut Randi (2015) bahwa, lembaga atau organisasi sebagai wahana dalam memberikan kontribusi positif pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Uphoff (1986) kelembagaan lokal bekerja pada tiga ruang kelembagaan. Pertama, kelembagaan lokal yang bekerja pada *public sector*, pada level ini terdapat dua jenis kelembagaan yaitu administrasi lokal dan pemerintahan lokal. Peran utama dari administrasi lokal adalah memberi saran petani dan mendemonstrasikan penggunaan teknologi terbaru untuk peningkatan produksi pertanian. Para pelaku di dalam administrasi lokal ini adalah kaum profesional. Sementara pemerintahan lokal berperan dalam hal memfasilitasi promosi produk pertanian sehingga produk tersebut di lebih luas tidak hanya di dalam negeri maupun diluar negeri. Kedua, kelembagaan lokal yang bekerja pada *Voluntary sector*, terdapat 2 jenis kelembagaan yaitu keanggotaan organisasi dan koperasi. Peran Organisasi macam ini hanya menjalankan fungsi intermediasi yakni menjembatani kebutuhan anggotanya sehingga mereka memperoleh kemudahan dalam mendapatkan baik barang maupun jasa di bidang pertanian. Koperasi merupakan salah satu unit produksi pertanian yang sejajar dengan industri rumah tangga, perusahaan swasta ataupun perusahaan negara. Ketiga, kelembagaan yang bekerja pada *private sector* yang terbagi atas organisasi jasa dan perusahaan swasta.

Kelembagaan merupakan seperangkat aturan, prosedur, norma perilaku individual, dan kontrol terhadap sumber daya yang sekaligus mengatur hubungan seseorang dengan lainnya. Pengembangan kelembagaan merupakan suatu proses perbaikan yang mencakup struktur dan hubungan diantara anggota dalam organisasi untuk lebih produktif dengan tujuan memenuhi kebutuhan para anggotanya secara efektif, efisien dan adil (Nasution, 2002) Kelembagaan merupakan suatu norma atau kaidah peraturan atau organisasi yang memudahkan koordinasi dalam membentuk harapan masing-masing yang mungkin dapat dicapai dengan saling bekerjasama, yang didalamnya termasuk semua lembaga sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain, baik dalam bentuk suatu organisasi, maupun tradisi dan pranata yang terdapat dalam masyarakat yang terdiri dari unsur publik, swasta dan lembaga swadaya (Rintuh, Minar 2005).

Berdasarkan tingkatannya, kelembagaan dapat dikategorikan dalam



, yaitu: pranata sosial, kelompok, organisasi atau lembaga instansional. Pranata sosial adalah aturan-ang dianut oleh masyarakat secara umum dan meluas, sewa tanah, bagi hasil, ijon, pinjam meminjam antar injaman setelah panen, dan lain-lain. Kelompok (tani)

adalah kumpulan (petani-petani) yang bersifat informal. Ikatan-ikatan dalam kelompok berpangkal pada keserasian dalam arti mempunyai kesamaan dalam pandangan, kepentingan, dan pekerjaan serta ketenangan yang sama, misalnya kelompok pendengar siaran pedesaan, kelompok arisan. Organisasi atau perhimpunan (petani) adalah organisasi (petani) yang sifatnya formal, ada pengurus 16 dan anggota-anggota yang jelas terdaftar. Organisasi (petani) ini mempunyai anggaran rumah tangga yang tertulis, mencantumkan tujuan-tujuan, usaha-usaha, syarat-syarat keanggotaan, dan ketentuan lainnya (Adjid, 2001).

2.3 Konsep Peran kelembagaan

Peran kelembagaan petani dalam mendukung keberlanjutan pertanian sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku pembangunan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal (Noviatirida, 2011). Dalam melakukan usaha taninya petani mempunyai hubungan kerja dengan lembaga-lembaga pendukungnya, seperti kelompok tani, pedagang saprodi, pedagang hasil pertanian, penyuluh, koperasi, bank, dan pemerintah daerah (Cahyono dan Tjokropandojo, 2012). Dukungan kelembagaan dalam bidang pemasaran, modal, pengolahan, dan bimbingan teknis relatif rendah sehingga cenderung kurang kondusif bagi peningkatan kemandirian petani. Peran kelembagaan dalam keempat bidang tersebut pun termasuk kategori rendah (Managanta, et al, 2019).

Kelembagaan petani dibentuk pada dasarnya mempunyai beberapa peran, yaitu: (a) tugas dalam organisasi (*interorganizational task*) untuk memediasi masyarakat dan negara, (b) tugas sumberdaya (*resource tasks*) mencakup mobilisasi sumberdaya lokal (tenaga kerja, modal, material, informasi) dan pengelolaannya dalam pencapaian tujuan masyarakat, (c) tugas pelayanan (*service tasks*) mungkin mencakup permintaan pelayanan yang menggambarkan tujuan pembangunan atau koordinasi permintaan masyarakat lokal, dan (d) tugas antar organisasi (*extra-organizational task*) memerlukan adanya permintaan lokal terhadap birokrasi atau organisasi luar masyarakat terhadap campur tangan oleh agen-agen luar (Esman dan Uphoff dalam Garkovich, 1989). Oleh karena itu keberadaan Kelembagaan kelompok tani dan kelembagaan penyuluhan diharapkan mampu menjalankan fungsinya untuk meningkatkan pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penyuluhan dan lainnya. Anantanyu (2011) menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan petani dengan kegiatan penyuluhan pertanian dengan petani untuk berpartisipasi dalam kelembagaan petani,



dengan memberikan muatan pada penguatan kapasitas individu petani sekaligus kapasitas kelembagaan petani (Marbun, et al., 2019).

Kelembagaan petani mempunyai peran dalam mendukung keberlanjutan pertanian khususnya untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku pembangunan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan kelembagaan antara lain: (1) Memberikan dorongan dan bimbingan kepada petani agar mampu berkerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok; (2) Meningkatkan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, meningkatkan posisi tawar, meningkatkan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok dan peningkayan efisiensi dan efektivitas usahatani, serta; (3) Meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan dan latihan yang dirancang khusus bagi pengurus dan anggota (Hermanto dan Swastika, 2011).

Disisi lain, pemberdayaan kelembagaan pada masa depan perlu diarahkan agar berorientasi pada: a). Pengusahaan komoditas (pangan/non pangan) yang paling menguntungkan, b). Skala usaha ekonomis dan teknologi padat karya, c). *Win-win mutually* dengan kemitraan yang kolehial, d). Tercipta interdependensi hulu-hilir, e). Modal berkembang dan kredit melembaga (bank, koperasi, petani), f). Kooperatif, kompetitif dan transparan melalui sistem informasi bisnis, g). Memanfaatkan peluang di setiap subsistem agribisnis, serta h). Dukungan SDM yang berpendidikan, rasional, mandiri, informatif, komunikatif, dan partisipatif (inovatif) (Elizabeth, 2007a). Beberapa kunci dalam pengembangan kelembagaan untuk pemberdayaan adalah : adanya akses kepada informasi, sikap inklusif dan partisipasi, akuntabilitas, dan pengembangan organisasi lokal Lebih jauh dikemukakan bahwa ciri utama kelembagaan tradisional adalah sedikit kelembagaan, namun banyak fungsi. Beda halnya dengan pada masyarakat modern yang dicirikan oleh munculnya banyak kelembagaan dengan fungsi-fungsi yang spesifik dan sempit- sempit (Saptana, et al, 2003).

Menurut Hasibuan, et al. (2012), Mayasari dan Nangameka (2015) dan Ikbal (2014), bahwa kelompok tani berperan dalam pemenuhan produksi serta meningkatkan dan mengembangkan petani dan keluarganya sebagai subjek pendekatan pembangunan pertanian. Kelompok tani diharapkan mampu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani, dan daya



saing petani, namun sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal (Anantanyu, 2011). Dilain pihak gapoktan sebagai gabungan kelompok tani terkesan hanyalah sebagai alat, dan merupakan sebuah pilihan bukan keharusan. Gapoktan perlu membangun jejaring sosial dengan pihak lain, memperbanyak peran diluar aktivitas produksi atau usahatani. Pembentukan dan pengembangan Gapoktan harus menggunakan basis sosial capital setempat dengan prinsip otonomi daerah, pemberdayaan dan kemandirian lokal menuju pembangunan yang berkelanjutan (Pujiharto, 2010).

Santosa dan Darwanto (2015), menyebut bila permasalahan utama dalam kelembagaan petani terletak pada fungsi dan peran kelembagaan dalam menjembatani petani dengan pengusaha pertanian. Oleh karena itu, penguatan kerjasama perlu dilakukan untuk meningkatkan performa kelembagaan petani baik penguatan internal oleh sesama anggota dan penguatan eksternal melalui pembinaan dari penyuluh pertanian dan stakeholder lainnya. Kelembagaan petani yang dimaksud di sini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas (*local institution*), yang berupa organisasi keanggotaan (*membership organization*) atau kerjasama (*cooperatives*) yaitu petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama (Uphoff, 1986).

2.4. Kelembagaan Petani

Kelembagaan didefinisikan sebagai pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi. Selain itu, lembaga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya (Sapta Anantayu, 2011). Sedangkan petani didefinisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan



umum pengertian dari pertanian adalah suatu ia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, ikanan dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan

mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim (Hakim, 2018).

Kelembagaan petani yang dimaksud disini adalah lembaga petani yang berada pada kawasan lokalitas (*local institution*), yang berupa organisasi keanggotaan (*membership organization*) atau kerjasama (*cooperatives*) yaitu petani-petani yang tergabung dalam kelompok kerjasama. Kelembagaan ini meliputi pengertian yang luas, yaitu selain mencakup pengertian organisasi petani, juga 'aturan main' (*role of the game*) atau aturan perilaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial, termasuk juga kesatuan sosial/kesatuan sosial yang merupakan wujud kongkrit dari lembaga itu (Sapta Anantayu, 2011).

Sesbany (2010) menjelaskan bahwa kelembagaan petani memiliki titik strategis (*entry point*) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumber daya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme petani (kelompok tani). Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan. Kelembagaan di Indonesia perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani (seperti: kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh dan kelembagaan permodalan). Dalam melakukan usahataniya petani mempunyai hubungan kerja dengan lembaga-lembaga pendukungnya, seperti kelompok tani, pedagang saprodi, pedagang hasil pertanian, penyuluh, koperasi, bank, dan pemerintah daerah (Cahyono dan Tjokropandojo, 2012).

Lebih lanjut Syahyuti (2007) menegaskan, bahwa Gapoktan menjadi lembaga gerbang (*gateway institution*) yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Menurut Anantanyu (2011), bahwa Keberadaan petani tanpa difasilitasi oleh kelompok tani akan mengakibatkan ketidakberdayaan posisi tawar petani dan harga jual padi.

